

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan hak menentukan nasib sendiri sebagai proses pencapaian otonomi oleh masyarakat Kurdi di Suriah pada tahun 2020—2022, seperti yang dirumuskan dalam bagian Rumusan Masalah. Dari berbagai paparan yang telah penulis jelaskan pada pembahasan dan analisis penelitian ini, masyarakat Kurdi di Suriah menentukan nasibnya sendiri dengan mencapai dan mempertahankan otonominya melalui berbagai cara, seperti melalui cara militer dengan berhasil melawan serangan dari Turki, pasukan SNA dukungan Turki, militer pemerintah Suriah, hingga dari sel-sel tidur Daesh terhadap wilayahnya. Dalam sisi politik, pemerintahan pimpinan masyarakat Kurdi di Suriah/AANES telah menerapkan berbagai kebijakan internal untuk menghadirkan sistem politik konfederalisme demokratis yang terdesentralisasi dan berbeda dibanding sistem politik lain di kawasan Timur Tengah. AANES juga telah melakukan berbagai aksi diplomatik, yang menghasilkan adanya pengakuan politik dari Katalonia pada tahun 2021. Dalam sisi ekonomi, pemerintahan pimpinan Kurdi telah memanfaatkan kekayaan minyaknya yang melimpah sebagai sumber utama pendapatannya dan mempraktikkan sistem ekonomi alternatifnya yang tidak bergantung pada konsep negara-bangsa, meski masih banyak kekurangan ekonomi yang terjadi di wilayah AANES.

Penulis berargumentasi bahwa asumsi dasar penulis, yaitu bahwa masyarakat Kurdi di Suriah telah mendapatkan otonomi dalam kadar yang cukup terlihat, tetapi belum mendapat otonomi penuh karena masih adanya pengaruh poskolonial dari pihak asing, dapat dibuktikan melalui penelitian ini. Masyarakat Kurdi di Suriah memang telah berhasil mencapai otonomi dan mempertahankannya pada tahun 2020—2022, tetapi masih banyak pengaruh bernuansa kolonial dari pihak asing yang menghalangi penerapan cita-citanya, yaitu mewujudkan wilayah otonom demokratis di Suriah, terutama di bagian utara dan timur negara tersebut. Pembangunan-pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan pimpinan Kurdi dalam rangka menentukan nasibnya sendiri mengalami banyak tantangan, yang juga dapat dijelaskan melalui

perspektif dari teori poskolonialisme. Wilayah otonom masyarakat Kurdi masih memiliki ketergantungan militer dengan Amerika Serikat, Suriah, dan Rusia; ketergantungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Suriah; dan terus mendapat campur tangan politik dan ekonomi dari Turki beserta pasukan dukungannya dan campur tangan dari Daesh. Beberapa contoh dari tantangan bagi pemerintahan pimpinan Kurdi untuk menentukan nasib sendirinya secara optimal, terutama akibat adanya nilai-nilai poskolonialisme di wilayahnya, adalah adanya ratusan ribu pengungsi dalam banyak kamp pengungsi yang membludak, politisasi air dari Turki, dan penyebaran wabah penyakit yang memiliki campur tangan pihak asing. Di lain sisi, dalam menerapkan hak menentukan nasib sendirinya, pemerintahan pimpinan Kurdi justru juga dalam kesempatan-kesempatan tertentu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak menentukan nasib sendiri yang dipunyai masyarakat lain, seperti dengan adanya penyensoran media, perekrutan paksa ke dalam militer SDF, hingga klaim penangkapan dan penyiksaan oleh aparat keamanan.

Pada akhirnya, masyarakat Kurdi tetap bisa menerapkan hak menentukan nasib sendirinya dan mempertahankan otonominya pada tahun 2020 hingga tahun 2022—dengan tidak adanya penambahan atau pengurangan wilayah kekuasaan/pemerintahannya selama periode tersebut. Otonomi yang penuh baru bisa dicapai oleh masyarakat Kurdi dan masyarakat AANES lainnya ketika nilai-nilai poskolonialisme hilang atas wilayahnya.

#### **4.2. Saran**

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya, dengan tema yang serupa, dapat dilakukan untuk meneliti peristiwa-peristiwa pada periode waktu terbaru sehingga dapat lebih aktual. Walau penulis menyatakan bahwa Perang Saudara Suriah telah memasuki tahap perang yang “membeku”, penulis menilai bahwa tetap akan terdapat perubahan dalam kondisi otonomi masyarakat Kurdi di Suriah semenjak tahun 2022. Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya, baik mengenai penerapan hak menentukan nasib sendiri masyarakat Kurdi atau mengenai poskolonialisme di wilayah otonom pimpinan Kurdi (atau keduanya), dilakukan dalam lingkup yang lebih sempit supaya penelitian dapat lebih terfokus pada suatu objek penelitian tertentu sehingga menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan lengkap.